

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainudin, 2011 *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Amirudin dan Asikin, Zainal, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- AR, Hanta Yuda, 2010, *Presidensialisme Setengah Hati Dari Dilema Ke Kompromi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Asshidiqie, Jimly, 2013, *Menegakkan Etika Penyelenggaraan Pemilu*, Raja Grafindo, Jakarta
- Budiardjo, Miriam, 2000, *Sistem Pemilu Yang Bagaimana? Dalam Sistem-Sistem Pemilu, Suatu Himpunan Pemikiran*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta
- Efendi, Jonaedi dan Ibrahim, Johnny, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Prenadamedia Grup, Depok
- Harun, Refly, 2016, *Pemilu Konstitusional Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan Kedepan*, Rajawali Pers, Jakarta
- Isra, Saldi, *Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitusional*, 2021, PT. RajaGrafindo Persada, Depok
- Kartawidjaja, Pipit R., dan Aminuddin, M. Faishal, 2014, “*Demokrasi Elektoral (Bagian I): Perbandingan Sistem dan Metode Dalam Kepartaian dan Pemilu*”, Sindikasi Indonesia, Surabaya.
- Kusnardi, Moh. dan Ibrahim, Harmaily, 1988, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, PSHTN- FHUI, Jakarta
- Labolo, Muhadam dan Ilham, Teguh, 2015 *Partai Politik dan Sistem Pemilu di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Lubis, M. Solly, 1980 *Asas-asas Hukum Tata Negara*, Alumni, Bandung
- MD, Moh. Mahfud, 2014, *Politik Hukum Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Norris, Pippa, 2014, “*Electoral Engineering: Voting Rules and Political Behavior*”, Cambridge University Press, Cambridge
- Nurhasim, Moch, 2020, “Adaptasi Sistem Pemilu Paralel bagi Indonesia”, Airlangga University Press, Surabaya
- Siahaan, Pataniari, 2012,

Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945, Konpress, Jakarta

Soekanto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta

Sukmadinata, Nana Syaodih, 2005, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung, Rosda Karya, Bandung

Sumadi, Ahmad Fadlil, 2011, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta

Surbakti, Ramlan, Supriyanto, Didik, dan Santoso, Topo, 2011, *“Memaksimalkan Derajat Keterwakilan Partai Politik dan Meningkatkan Akuntabilitas Calon Terpilih”*, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta

B. Jurnal

Abadi, M. Husnu, Hajri, Wira Atma, dan Muslikhah, Umi, “Implikasi Atas Perubahan Sikap Mahkamah Konstitusi Terhadap Pengujian Undang-Undang yang Merupakan Kebijakan Hukum Terbuka, Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 116/PUU-XXI/ 2023”, *Journal of Mandalika Social Science*, (2024), 3:1, Riau

Ady Supryadi, Aesthetica Fiorinimatika, Rena Aminwara, Fahrurrozi, dan Imawanto, “Penafsiran Konstitusi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU- XXI/2023 Tentang Ambang Batas Parliamentary”, *Jurnal Ganec Swara*, 18:1, (2024)

Al-Fatih, Sholahuddin, “Implementasi *Parliamentary Threshold* Dalam Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota”, *Jurnal AHKAM*, (2018) 6:2, Jakarta

Bachdim, Fahri, “Eksistensi Kedaulatan Rakyat dan Implementasi *Parliamentary Threshold* Dalam Sistem Pemilu di Indonesia”, *Jurnal Hukum*, (2021) 2:2.

Benartin, Bernardinus Putra, dan Yudhoprakoso, Paulus Wisnu, “Pengaruh Ambang batas parlemen Terhadap Kedudukan Partai Oposisi Serta Kaitannya Dengan Sistem Pemerintahan Presidensil di Indonesia”, *Jurnal Gloria Justitia*, 2022, 1:2, hlm. 178, Jakarta Selatan.

Benoit, Kenneth, “Which Electoral Formula is the Most Proportional? A New Look with New Evidence”, *Political Analysis*, (2000), 8:4

Bimo Fajar Hantoro, “Implikasi Pilihan Metode Konversi Suara terhadap Proporsionalitas Perolehan Kursi dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2021,

51:4, YogyakartaDoly, Denico, “Putusan Mahkamah Konstitsui tentang Ambang Batas Parliamentary”, *Jurnal DPR*. (2024), 5:1, Jakarta Pusat.

Dewi, Oki Anit Candra dan Wardhana, Eka Wisnu, “Pengembangan Sistem Penghitungan Konversi Suara Kursi Parliamentary Metode *Sainte-Laguë* Berbasis *Visual Basic Application*” *Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, (2024), 6:1, Surabaya

Dzakwan, Kusuma, Fadhil Putra, Masykur, Muhammad Zidan, Rahman, Muh Rakhul, & Rahmawati, Nurlali, “Penghapusan Ambang Batas Parliamentary: Analisis Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Prespektif Hukum Tata Negara”, *Palangka Law Review*, 2024, 4:2

Firdaus, Sunny Ummul, “Relevansi *Parliamentary Threshold* terhadap Pelaksanaan Pemilu yang Demokratis”, *Jurnal Konstitusi*, (2011), 8:2, Jakarta

Gunanto, Hijri, D., Y. S., & P. H., Nurhasanah, “Dinamika Koalisis Partai Politik dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2024”, *Jurnal Administrasi Negara*, (2024), 12:1

Hasibuan, SD. Fuji Lestari, Yonnawati, “Pemberlakuan *Parliamentary Threshold* Dalam Penyelenggaraan Pemilu”, *Jurnal Pro Justitia*, 2020,1:1, hlm. 2, Lampung.

Humairo, Putri Rummana, dan Ruslie, Ahmad Sholikhin, “Batas Parliamentary *Parliamentary Threshold* & Presidential Threshold di Indonesia Dalam Prinsip Demokrasi & HAM”, *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, (2023), 3:2, Surabaya

Mahzar dan Sari,Putri Kemala, “Analisis Yuridis Penerapan *Presidential Threshold* Pada Pemilu di Indonesia Berdasarkan Konsep Negara Demokrasi”, *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum*, (2023), 3:2, Aceh

Masyrofah, “Arah Perubahan Sistem Pemilu dalam Undang-Undang Politik Pasca Reformasi, *Jurnal Cita Hukum*, (2013), 1:2, Tangerang Selatan

Nafian, M. Zidny Ilman, “Evaluasi Sistem Pemilu dan Ambang Batas Parliamentary di Indonesia”, *Prosiding Seminar Hukum Aktual*

Nurdin, Nurdin, dan Alamsyah, Syauiid, “Penerapan Sistem Kepartaian Di Indonesia Dan Jerman Dalam Perspektif Perbandingan Politik,” *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, (2023), 1:2

Nurhasim, Moch., “Fisibilitas Sistem Pemilu Campuran: Upaya Memperkuat Sistem Presidensial Di Indonesia”, *Jurnal Penelitian Politik*, (2014), 11:1, JakartaPamungkas, Yogo, “Tinjauan Ambang Batas Perolehan Suara berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 terhadap UUD 1945”, *Jurnal Rechts Vinding*, (2013), 3:1, Jakarta

Pulungan, Dara Mukhlisah, Irwansyah, Arhab, Annisah Basimah, dan Purba, Muhammad Raihan Khair, “Tinjauan Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 Tentang Ambang batas parlemen *Threshold* Terhadap Partai Politik Kecil”, *Journal of Islamic Thought and Muslim Culture*

Putri, Dayandini Hastiti dan Sofwan, Edi, “*Parliamentary Threshold* dan Masa Depan Multipartai di Indonesia: Analisis Putusan MK No. 116/PUU-XXI/2023”, *Majalah Hukum Nasional* (2024), 54:2, Tangerang Selatan

R., Tota Pasaribu, S.S, Widya, dan Muradi, “Pemilu Berintegritas (Studi Pada Pendaftaran Pemilih Terhadap Pengguna Surat Keterangan Domisili Dalam Pilkada Samosir Tahun 2015),” *Journal of Governance*, (2018), 3:2, Jakarta

Vanessa Ingka Putri, Vira Ayuningtyas, Yurike Siti Mariyam, dan Lubabah Shobrina Syahida, “Pelanggaran Hak Kedaulatan bagi Rakyat Secara Sistematis dalam *Parliamentary Threshold* pada Pemilu di Indonesia”, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, (2023), 5:1

Wardhani, Primandha Sukma Nur, “Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilu”, *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, (2018), 1:1, Yogyakarta

C. Tesis

Adelia, Adlina, *Relevansi Ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold) dengan Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia*, Tesis Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018

Imani, Ima Nur, “Perbandingan Hasil Perolehan Kursi dengan Menggunakan Sistem Penghitungan Suara *Sainte Laque* dan *Kuota Hare*”, Tesis Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2021

Muhammad Ilham Mujahidi, “Analisis Siyasah Dusturiyah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Pasal 414 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu”, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo, 2025

Syamsudin, “Penentuan *Parliamentary Threshold* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu”, Tesis Universitas Borneo, Tarakan, 2022

D. Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Komisi Pemilu Nomor 1317/PL.01.09-Kpt/06/KPU/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/PUU-VII/2009

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XVI/2018

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

E. Website

Administrator MKRI, “Ambang batas parlemen untuk Menyederhanakan Sistem Kepartaian”, <https://www.mkri.id> diakses pada Januari 2025 Pukul 18.31 WIB

Antaranews, “Menimbang Revisi Undang-Undang Pemilu”, <https://www.antaranews> diakses pada Januari 2025 Pukul 18.54 WIB

DA, Ady Thea, “Putusan MK Tentang *Parliamentary Threshold* Sejalan dengan Konstitusi” dalam www.hukumonline.com, diakses Juni 2025

Farisa, Fitria Chusna dan Galih, Bayu, *Ketentuan Ambang batas parlemen di UU Pemilu Digugat keMK*, <https://nasional.kompas.com>. diakses pada Oktober 2024

Hutajulu, Matius Alfons, “Apresiasi Putusan MK, Perludem: Peningkatan PT Meningkatkan Suara Terbuang dalam” <https://news.detik.com> diakses pada Juni 2025

Kompas.com, “Anung: Proses Pungutan Suara Pemilu 2009 Paling Jelek”, <https://nasionalkompas.com>, diakses Juli 2025

K, Melalusa Susthira, “Wakil Ketua Komisi II DPR RI Soal Putusan MK: Jadi Catatan Penting” dalam <https://www.antaranews.com> diakses pada Februari 2025

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Konstitusi*, <https://www.mkri.id>, diakses pada Oktober 2024

Mu'min, Muhammad Saeful dan Sanusi, *Implikasi Ambang Batas Parliamentary Threshold Terhadap Kursi Parliamentary*, <https://jurnal.ugj.ac.id> Diakses Pada September 2024

Perludem, *Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 tentang Ambang Batas Parliamentary*, <https://perludem.org> diakses pada September 2024

Rafni, Intan Afrida, “MK Batalkan Ambang batas parlemen 4 Persen, Jerry Sumampouw: Pututsan yang Tepat” dalam <https://disway.id>, diakses Juni 2025

Sari, Brigitta Belia Permata, *Penjelasan MK soal Putusan PT 4% Harus Diubah Sebelum Pemilu 2029* <https://news.detik.com> diakses pada September 2024

WEBADM, “Kuota *Hare* dan Sainte Laguë dalam UU Pemilu, <https://lk2fhui.law.ui.ac.id> diakses juli 2025

